

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM
(DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2009-2012**

VELLA KURNIASIH FITRI

E-mail: vellakf@gmail.com

HP: 085271628844

Anggota:

M. Rasuli

Alfiati Silfi

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the influence of Local Government Measurement Ratio toward the Capital Expenditure for Public Services.

The The samples which are use in this research are regency/municipality of Riau province that report routine the realization report of the estimate income of regional expense (APBD) from 2009 until 2012 for Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah(www.djpkpd.go.id). The sampling method used in this study is the sample selection aims (purposive sampling method). The stastical method used to test the research hypothesis is multiple regression using SPSS 18 software.

The results of this research show that The Autonomy rate has negative influence toward the capital expenditure for public service. The effectiveness rate has positive influence toward capital expenditure for public service. The efficiency rate has negative influence toward capital expenditure for public service. Fund Local Own Revenue (PAD) has positive influence toward capital expenditure for public service , and the General Allocation Fund (DAU) have a significant effect on the Capital Expenditure for public service

Key Word : autonomy ratio, effectiveness rate, efficiency rate, Fund Local Own Revenue, General Allocation Fund, capital expenditure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini mengalami cukup peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 6,4 persen (Badan Pusat Statistik, 2012). Besarnya angka pertumbuhan dan pendapatan nasional tidak terlepas dari besarnya pengaruh pendapatan daerah untuk setiap provinsi di Indonesia.

Sumbangsih pendapatan daerah dari sumber daya alam maupun sumber daya lainnya oleh kabupaten/kota setiap provinsi merupakan salah satu sumber keuangan yang menambah pundi-pundi pendapatan nasional. Tinggi pendapatan suatu daerah untuk negaranya dapat mendukung pembangunan nasional dalam berbagai aspek pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu infrastruktur dan pembenahan sarana dan prasarana yang merupakan hal vital dalam pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara adil dan merata.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2010 bahwa persentase dari total belanja pemerintah daerah yang mana belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja operasi. Data yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah menunjukkan:

Tabel Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 (dalam jutaan rupiah)

Nama Daerah	Belanja operasi	Belanja Modal	Total Belanja	% Belanja Operasi	% Belanja Modal
Kab. Indragiri Hulu	586.430	12.529	712.980	82 %	2 %
Kab. Kampar	1.075.851	252.349	1.558.121	69 %	16 %
Kab. Kuantan Singingi	345.501	74.344	478.976	72 %	16 %
Kab. Pelalawan	450.649	48.372	752.580	60 %	6 %
Kab. Rokan Hulu	310.710	102.652	491.641	63 %	21 %
Kota Dumai	230.328	80.470	420.131	55 %	19 %

Sumber: *Data statistik yang diakses pada www.djpk.depkeu.go.id*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dari total belanja pemerintah daerah dimana belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja operasi. Kabupaten Indragiri Hulu hanya memperoleh dua persen sedangkan belanja operasinya sekitar 82%. Sementara kabupaten Rokan Hulu mendapatkan porsi belanja daerah 21% dan belanja operasinya 63% dari total belanja daerahnya. Rendahnya porsi belanja modal daripada belanja operasi diindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menganggarkan alokasi belanja modal untuk anggaran sektor publik. Belanja modal merupakan pengeluaran modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya beban dalam pemeliharaan aset yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dari aset tersebut serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dalam membentuk karakter daerah yang mandiri (Mardiasmo, 2009).

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja terhadap APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik (Bastian, 2010). Menurut Putro

(2010) kecilnya alokasi belanja modal yang dianggarkan dengan dibandingkan dari total anggaran belanja daerah tidak cukup proposional. Sebaiknya, untuk belanja modal sebesar kurang dari 20%, sedangkan anggaran belanja tertinggi terdapat pada belanja pegawai yang mencapai 50% setiap tahunnya dari total anggaran belanja.

Salah satu indikator yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada penelitian ini adalah Rasio keuangan daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah (Ardhini, 2011). Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Halim, 2008). Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini, 2011). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah (Mahmudi, 2010).

Untuk Rasio Keuangan Efektivitas daerah adalah salah cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (Ardhini, 2011). Sehingga kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PADnya akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah (Sularso,dkk, 2011).

Rasio Keuangan Efisiensi Daerah adalah salah cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi (Ardhini, 2011). Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi tinggi maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi (Mahmudi, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) bahwa rasio kemandirian dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Salah satu indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Sumber PAD terbesar

adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah lain yang sah (Mardiasmo, 2004). Menurut Ardhani (2011) menunjukkan hasil secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Selain pendapatan asli daerah, indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai pembagian dan pembentukan daerah yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi, Desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya konkrit reformasi keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai “Apakah terdapat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2009-2012”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2009-2012.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD yang dihitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember pada satu periode tahun anggaran. APBD harus memuat sasaran yang telah ditetapkan melalui fungsi belanjanya, standar pelayanan yang

telah diharapkan dan biaya yang telah dianggarkan untuk suatu kegiatan yang bersangkutan serta sumber pendapatan yang diterima APBD untuk digunakan dalam belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal atau investasi, maka APBD harus menggambarkan secara ekonomis dalam kebutuhan peningkatan kualitas daerah tersebut demi memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal

Alokasi belanja modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Banyak penelitian yang telah menguji faktor-faktor tersebut dan hasilnya belum konsisten. Penelitian ini menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi alokasi belanja modal.

Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilaksanakan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Ardhini, 2011). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah (Halim, 2009).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim, 2012). Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin naik. Metode penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintahan di daerah masih belum baik. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan

hasil bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ardhini, 2011). Efisiensi yang rendah menyebabkan banyaknya layanan publik dijalankan apa adanya secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian dibelanjakan untuk belanja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar pemerintah daerah tidak cenderung berlomba-lomba mengeksploitasi PAD dengan membuat syarat pungutan baru yang pada akhirnya akan membebani masyarakat. Menurut Ardhani (2011) menunjukkan hasil secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan menurut Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut syafitri (2009) yang dikutip dalam Saragih (2003) menyatakan bahwa kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan yang sama. DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat kedaerah yang berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Provinsi Riau dari tahun 2009 - 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dari dokumen tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana lokasi umum. Laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id.

Definisi Operasional dan pengukurannya Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Yovita (2011) Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1)

Kemandirian daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil, dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Ardhini (2011) Rumusan rasio kemandirian daerah yaitu:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Tingkat Kemandirian adalah:

1. Membuat tabel perkembangan APBD tahun Anggaran 2009 sampai dengan tahun Anggaran 2012
2. Mengidentifikasi PAD dan total Penerimaan untuk masing-masing tahun Anggaran.
3. Membandingkan antara PAD dengan Total Penerimaan.
4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan dengan asumsi digunakan menurut Ardhini (2010):
 - a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - b. Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai

berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

- c. Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X_2)

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Menurut Ardhini (2011) Rumusan rasio Efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Tingkat Kemandirian adalah:

1. Membuat tabel perkembangan APBD tahun Anggaran 2009 sampai dengan tahun Anggaran 2012.
2. Mengidentifikasi PAD dan target Penerimaan untuk masing-masing tahun Anggaran.
3. Membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
4. menentukan tingkat efektivitas tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan dikatakan sangat efektif apabila tingkat kemandirian nya > 100 %.
 - 2) Kemampuan dikatakan efektif apabila tingkat kemandirian nya > 90 - 100 %.
 - 3) Kemampuan dikatakan cukup efektif apabila tingkat kemandirian nya > 80- 90 %.
 - 4) Kemampuan dikatakan kurang efektif apabila tingkat kemandirian nya > 60-80 %.
 - 5) Kemampuan dikatakan tidak efektif apabila tingkat kemandirian nya < 60 %.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3)

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Maka, menurut Ardhini (2011) rumusan untuk rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efisiensi adalah:

1. Membuat tabel belanja dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012.
2. Mengukur tingkat efisiensi. Adapun kriteria pengukurannya menurut Mahmudi (2011):
 - a. Apabila tingkat efisiensinya <5% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan sangat efisien.

- b. Apabila tingkat efisiensinya 5%-10% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan efisien.
- c. Apabila tingkat efisiensinya 11%-20% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan cukup efisien.
- d. Apabila tingkat efisiensinya 21%-30% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan kurang efisien.
- e. Apabila tingkat efisiensinya > 30% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan tidak efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_4)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), Menurut Yovita (2011) adapun indikator unruk mengukur PAD yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) (X_5)

Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Menurut Yovita (2011) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Provinsi Riau dari tahun 2009 - 2012. Berdasarkan data yang yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id dari tahun 2009 hingga 2012, hanya sebelas kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yang terdiri dari Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Analisis data penelitian dilakukan terhadap sebelas kabupaten/kota pada tahun 2009-2012. Data yang didapat tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 18.

Hasil pengolahan SPSS mengenai deskriptif variabel sebagai berikut :

Tabel Statistik Deskriptif 2009-2011

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5,3097	6,2870	5,5800	,21236	44
Std. Predicted Value	-1,273	3,329	,000	1,000	44
Standard Error of Predicted Value	,059	,202	,092	,035	44
Adjusted Predicted Value	5,1982	6,5573	5,5840	,25123	44
Residual	-,65249	,78684	,00000	,25072	44
Std. Residual	-2,446	2,950	,000	,940	44
Stud. Residual	-2,538	3,213	-,005	1,021	44
Deleted Residual	-,70211	,93353	-,00401	,30232	44
Stud. Deleted Residual	-2,748	3,716	,005	1,080	44
Mahal. Distance	1,150	23,668	4,886	5,194	44
Cook's Distance	,000	,602	,039	,102	44
Centered Leverage Value	,027	,550	,114	,121	44

a. Dependent Variable: LG10ABM

Dari data di atas dapat diketahui dengan jelas nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari keseluruhan variabel dengan menggunakan perusahaan sampel sebanyak 48 perusahaan, dengan tahun penelitian dari tahun 2007-2010.

Uji Ketepatan dan Koefisien Determinasi Hasil Uji Regresi

Tabel Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,891	,404		12,098	,000
LG10RKM	-,403	,293	-,356	-1,375	,177
REF	,001	,002	,119	,547	,588
REK	-,106	,185	-,113	-,573	,570
PAD	2,919	,000	,749	3,317	,002
DAU	-2,986	,000	-,164	-1,032	,309

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dibuat persamaan regresi untuk model penelitian sebagai berikut :

$$= 4,891 - 0,403 X_1 + 0,01 X_2 - 0,106 X_3 + 3,919 X_4 - 2,986 X_5$$

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel Hasil Pengujian Durbin-Watson
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,646 ^a	,418	,341	1,830

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat besar nilai *adjusted R²* sebesar 0,341 yang berarti 34,1% variabel independen yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempengaruhi alokasi belanja modal. Sisanya yaitu sebesar 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

Uji Statistik Kelayakan Model (Goodness of fit)

**Tabel Hasil Pengujian Model Regresi
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,939	5	,388	5,452	,001a
	Residual	2,703	38	,071		
	Total	4,642	43			

a. Predictors: (Constant), DAU, LG10RKM, REK, REF, PAD

b. Dependent Variable: LG10ABM

Dari tabel anova diatas, didapat nilai F hitung sebesar 8,815 dan dengan menggunakan tabel statistik F, didapatkan nilai F-tabel sebesar 2,43 maka F hitung (8,815) > F tabel (2,43) sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi layak. Hal ini juga didukung oleh nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari derajat kesalahan (0,05) maka model regresi ini layak digunakan dalam memprediksi PER.

Pengujian Hipotesis

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis

Model	t	Sig	α	hasil
LG10 RKM	-0,1375	1,77	0,05	Tidak Berpengaruh
REK	-0,573	0,570	0,05	Tidak Berpengaruh
REF	0,547	0,588	0,05	Tidak Berpengaruh
PAD	3,317	0,02	0,05	Berpengaruh
DAU	-1,032	0,309	0,05	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka didapat hasil seperti pada tabel 4.5 di atas. Variabel rasio kemandirian (LG10RKM) tidak signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan variabel rasio efektivitas (REK) tidak signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya adalah variabel rasio efisiensi (REF) tidak signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun pada variabel pendapatan asli daerah (PAD) signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli

daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan variabel dana alokasi umum (DAU) tidak signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Riau. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardhini (2011) dan Losa (2012) yang menunjukkan bahwa secara statistik adanya rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Riau yang dilihat pada laporan realisasi APBD. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Nilai rata – rata kemandirian keuangan daerah secara statistik yang tidak mencapai 0% atau sekitar -1,25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan pihak eksternal yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Semakin rendah rasio kemandirian mengantung arti dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, provinsi ataupun asing semakin tinggi. Rasio ini juga menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dimana semakin rendah tingkat kemandiriannya semakin rendah pula partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerahnya.

Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Riau. Adanya hasil statistik nilai rata-rata dari rasio efektivitas yang menunjukkan tingkat efektivitas hanya mencapai 53% menggambarkan bahwa tingkat efektivitas di kabupaten/kota provinsi Riau tidak efektif. Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila minimal 100% dan dianggap tidak efektif apabila tingkat kemandiriannya < 60%.

Dalam penelitian ini hasil yang tidak signifikan juga dipengaruhi karena kecilnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai tingkat efektivitas dari 44 sampel yang diteliti hanya sembilan sampel yang mencapai efektivitasnya yakni diatas 100%. Artinya, tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sehingga itu pemerintah perlu melakukan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Riau. Dari data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah dari sebelas kabupaten/kota yang melaporkan laporan realisasi APBD secara rutin selama tahun 2009-2012 adalah sebesar 56,30 %. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada kemampuan suatu daerah dalam memajemen keuangan daerahnya dikatakan tidak efisien karena $> 30\%$.

Pada sektor pelayanan publik suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Namun, dari sampel pada penelitian ini disebabkan tumpang tindihnya pendanaan pada suatu kegiatan dan tidak sesuai dengan implementasi anggarannya. Hal ini terlihat dari banyaknya layanan publik apa adanya secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang sesungguhnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Data pada table 4.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan asli daerah keuangan daerah dari sebelas kabupaten/kota yang melaporkan laporan realisasi APBD secara rutin selama tahun 2009-2012 adalah sebesar 94.434 juta Rupiah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dengan manajemen keuangan yang transparansi, dan akuntabel. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setiawan (2010); Adiwiyana (2011); Yovita (2011) dan Soeratno (2011) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pengaruh Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Hasil yang sama juga telah dilakukan oleh Syafitri (2009) dan Putro (2010) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini cukup beralasan karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan belum dibagikan secara merata dan menyeluruh.

Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Bagi daerah yang minim akan sumber daya alamnya DAU adalah sumber pendapatan yang penting guna mendukung pembiayaan operasional

sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerahnya. Dari sebelas kabupaten/kota, hanya delapan kabupaten/kota yang menerima secara rutin. Jumlah tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang besar pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota. Namun, penerimaan DAU juga tidak memberikan dampak terhadap yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang berkesinambungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan regresi linear berganda, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu ada variabel yang tidak memenuhi asumsi uji normalitas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja modal namun setelah dilakukannya transformasi maka data tersebut normal dan peneliti dapat melanjutkan penelitian. Hasil uji individual (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Nilai *Adjusted R Square* didalam penelitian ini adalah sebesar 34,1% yang berarti bahwa variabel alokasi belanja modal dijelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebesar 34,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan didalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat didalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah sampel pada penelitian ini tergolong kecil yaitu hanya sebanyak 11 Kabupaten/Kota dan yang hanya ada di Provinsi Riau.
2. Tingkat *Adjusted R²* yang rendah dari model yang diuji yaitu sebesar 0,341 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan didalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang dipilih sebaiknya lebih banyak agar dapat menunjukkan interpretasi hasil yang lebih memuaskan dikarenakan jumlah sampel yang banyak.
2. Rendahnya *Adjusted R²* dari model yang di uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap alokasi belanja modal, sehingga selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini, 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan. *Jurnal hal 9-11: Universitas Diponegoro*. Semarang
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, 2012. Diakses melalui www.djpk.depkeu.go.id
- Dwirandra, A.A.N.B. 2006. Efektivitas dan kemandirian keuangan. *Skripsi. Universitas Udayana*. Bali
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Khairani, Siti. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Terhadap Belanja Aparatur, dan Belanja Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Vol.7 No.1 hal 54-75, 2008*.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Losa, Alfino. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal hal 4-13 Repository: Universitas Riau*. Pekanbaru
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah. *JAAI Volume 8 NO. 2 hal 101-118, Desember 2004*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*. Medan
- Sularso, Havid, dkk. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman. *Jurnal Media Riset Akuntansi, vol.1No. 2 Agustus 2011 hal 109-123*. Purwokerto
- Udin, Rinaldi. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *STIE Indonesia. Jurnal ISSN 1693 – 9093 Volume 8, Nomor 2, Juni 2012 hal 105 – 113*. Pontianak
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2012. Diakses melalui: [www:djpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf](http://www.djpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf)
- Yovita, Farah Marta, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi. Universitas Diponegoro*. Semarang